

**PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN TIMBANGAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANSIDIMPUAN**

SKRIPSI

**DI SUSUN
OLEH :**

**KHAIDIR PAHMI
NIM: 11 851 0039**



**PROGRAM STUDI KEPERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN TIMBANGAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

**DI SUSUN
OLEH :**

KHAIDIR PAHMI
NIM: 11 851 0039

**PROGRAM STUDI KEPEREMINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan**


Nama Mahasiswa : Khaidir Pahmi


NIM : 11 851 0039

Program Studi : Pemerintahan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP
Pembimbing I


Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing II

Mengetahui



Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

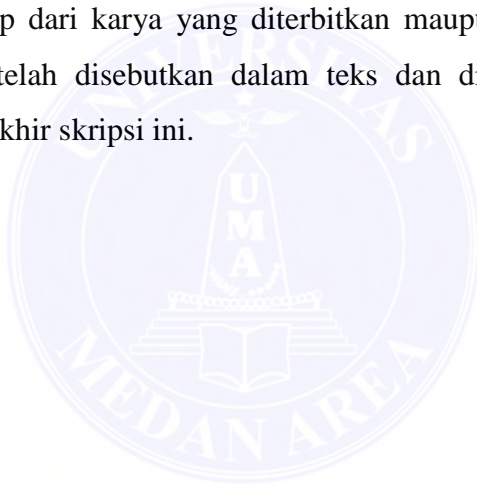
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khaidir Pahmi

Nim : 11 851 0039

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan** ” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.



Medan, 2017

Khaidir Pahmi
NIM. 11 851 0039

ABSTRAK

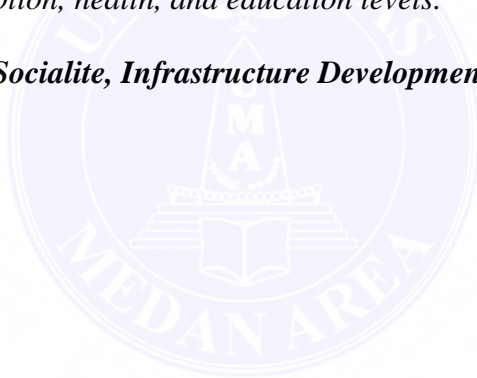
Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disaat pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat melakukan suatu musyawarah diperlukannya suatu aspirasi dan keikut sertaannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan serta dapat berpartisipasi untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian adanya pembangunan kelurahan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui program-program pembangunan yang direncanakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di setiap desa. Pembangunan lebih diartikan sebagai pembangunan fisik atau infrastruktur. Hal ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pasar, sekolah, pelayanan kesehatan, dan sebagainya di perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Demikian pula, kesejahteraan masyarakat kelurahan lebih diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan secara fisik, yaitu peningkatan pendapatan, konsumsi, taraf pendidikan, dan kesehatan.

Kata Kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

National development is in fact a whole Indonesia national development and the construction of society entirely based on Pancasila and the 1945 Constitution. When the Government wards and community leaders are doing a deliberation he needed a companion keikut and aspiration of the community in the decision-making process of development and can participate to express their thoughts. The purpose of this research is to know the role of community leaders Towards infrastructure development in Kelurahan, Kecamatan Scales Padangsidimpuan North, Padansidimpuan. The method of research used descriptive research method that is based on qualitative data. The data collection technique in this study was in depth interviews, and documentation. Research results the presence of neighborhood development is an effort in improving the welfare of the local community through development programs planned in the development planning discussion (musrenbang) at each village. The construction of a more defined as physical development or infrastructure. This is implemented through the provision of infrastructure, roads, bridges, irrigation, markets, schools, health services, and so on in the rural areas, aiming to increase productivity in the agricultural sector. Similarly, community welfare wards are more defined as the improvement of the welfare of the physically, i.e. an increase of income, consumption, health, and education levels.

Key Words: Role, Socialite, Infrastructure Development



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berjudul **“Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan”**. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, M.AP, selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, SPd, MAP selaku Ketua Program studi Pemerintahan. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Seluruh staff dan Dosen Program Studi Pemerintahan, Pegawai FISIP UMA dan rekan-rekan kuliah.

Terkhusus dan teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang luar biasa, mendidik, memotivasi dan memberikan banyak nasehat sampai detik ini. Tak lupa juga keluarga yang slalu mendukung penulis dengan caranya sendiri selama ini, dan dukungan moril dan moral serta doah-doahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Medan, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Uraian Teori	11
2.1.1. Peran , Peranan, Berperan	11
2.1.2. Pemerintahan Kota	15
2.1.3. Pemerintahan Kelurahan	18
2.1.4. Pengertian Tokoh Masyarakat.....	20
2.1.5. Pengertian Pembangunan	27
2.1.6. Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan	33
2.2. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Teknik Pengumpulan Data	38
3.3 Informan Penelitian	39

3.4 Teknik Analisis Data	40
--------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1. Struktur Pemerintahan Kelurahan	44
4.1.2. Tugas Perangkat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Tugas Di Kelurahan Timbangan.....	48
4.1.3. Gambaran Singkat Tokoh-Tokoh Masyarakat Kelurahan Timbangan	53
4.1.4. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.....	54
4.1.5. Proses Pengambilan Keputusan Pembangunan Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan	55
4.1.6. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara	58
4.1.7. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Timbangan	64
4.1.8. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Motivator Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan	68
4.1.9. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Fasiltator Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan	69
4.1.10. Peran Tokoh Masyarakat Sebagai Mobilsator Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Timbangan	71
4.1.11. Kendala Tokoh Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Timbanagan.....	72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik secara rohani dan jasmani.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara NKRI. Oleh sebab itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara tepat kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling humanis (Nugroho dan Rochmin Danuri, 2004).

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan secara merata oleh pihak-pihak tertentu.

Masyarakat tercipta secara utuh, lahir dan batin serta merata, dalam makna tersebut mengandung bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah maka perlu perencanaan. Perencanaan dan pengendalian merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Ketetapan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut.

Desa atau Kelurahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana perubahannya dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga serta unsur penggerak yang mampu

memobilisasi dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang bersifat sistematis, termasuk tugas pembangunan yang multidimensi selain Kepala Kelurahan sebagai pemimpin di suatu kelurahan khususnya di kelurahan Timbangan kecamatan Padangsidimpuan utara maka ada juga tenaga serta unsur penggerak yang mampu mengakomodasi dan mengakomodir kemampuan masyarakat dan penggeraknya yaitu Tokoh Masyarakat.

Tokoh masyarakat juga ikut serta dalam membangun kelurahan di karenakan sosok dari Tokoh Masyarakat adalah sosok yang berkompetensi atau sebagai elit masyarakat, dimana sosok dari Tokoh Masyarakat itu sendiri dapat bertindak sebagai representasi masyarakat atau mengatas namakan masyarakat.

Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi kedalam Tokoh masyarakat Formal atau Elit Formal dan tokoh masyarakat Informal atau Elit Informal. Elite menurut Lipset dan Solari yaitu suatu posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas. Oleh sebab itu, Tokoh masyarakat dapat dikatakan sebagai sesosok pemimpin serta wakil dalam masyarakat dikarenakan hal tersebut tokoh masyarakat bekerja dalam lingkup daerah yang kecil.

Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah kelurahan tokoh masyarakat ikut serta untuk mengajukan atau mengutarakan suatu pemikiran dan

pendapat dari masyarakat karena dalam pembangunan kelurahan khususnya di bidang infrastruktur kelurahan akan berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Maka dari itu, pembangunan infrastuktur kelurahan harus dilakukan dengan cara efektif, efisiensi dan transparan agar terciptanya suatu masyarakat kelurahan yang makmur dan sejahtera. Dalam perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur kelurahan tersebut diperlukan adanya pengambilan keputusan yang terwadahi dalam suatu forum musyawarah kelurahan yang melibatkan kepala lurah, perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat yang mewakili warga di kelurahan sebagai pelaksanaan keputusan pembangunan. Untuk melaksanakan program-program yang ada di kelurahan Timbangan kecamatan Padangsidimpuan utara kota Padangsidimpuan perlu diadakan suatu musyawarah untuk mengambil suatu keputusan terbaik dari berbagai alternatif yang akan menjadi prioritas dengan melibatkan unsur pemerintah kelurahan beserta aparat kelurahan dan tokoh masyarakat yang ada.

Namun, forum musyawarah atau yang dikenal dengan musrembang itu sekarang praktis berubah menjadi forum ketuk palu karena pekerjaan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, menyebabkan partisipasi masyarakat kurang dalam proses pembangunan kelurahan sehingga disaat dalam proses pengambilan keputusan maka masyarakat mewakilkan tokoh masyarakat sebagai wakil dari aspirasi masyarakat itu sendiri, sehingga peran dari pejabat pemerintah kelurahan masih mendominasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, sedangkan peran tokoh masyarakat menjadi sebagai wakil dari warga kelurahan kurang berpengaruh di dalamnya, sebab dalam forum itu tidak jarang kepala kelurahan dan aparat kelurahannya hanya mengumumkan programnya dan

langsung disetujui oleh peserta musrembang. Dalam pengambilan suatu keputusan pada pembangunan sangatlah penting suatu nilai-nilai musyawarah yang mufakat.

Disaat pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat melakukan suatu musyawarah diperlukannya suatu aspirasi dan keikut sertaannya masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan serta dapat berpartisipasi untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan ”** disebabkan karena dalam pembangunan infrastruktur serta pembangunan yang dapat memajukan dan mensejahterakan kelurahan Timbangan dan masyarakat yang didalamnya maka sosok dari Tokoh masyarakat lebih berperan dan merespon dari pada aparat pemerintah kelurannya.

1.2. Pembatasan Masalah

Ditinjau dari judul yang penulis sajikan dapat diambil suatu pembatasan masalah yaitu :

1. Telah sejauh mana Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Infarktustur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
2. Telah sejauh mana peran Tokoh Masyarakat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Penelitian dilakukan pada tahun 2012 – 2013.

1.3. Rumusan Masalah

Setiap kejadian yang timbul pada diri manusia maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, dan biasanya dengan kemampuan seseorang yang dapat berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut maupun itu secara rasional dan objektif. Menurut Winarmo Surachmad Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk menyelesaikannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus. Dalam menyelesaikan suatu masalah dibuatlah suatu perumusan masalah, yang bertujuan agar masalah tersebut jelas batasannya, kedudukannya dan sekaligus mencari alternatif pemecahannya.

Berdasarkan dengan pemikiran diatas dirumuskanlah masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara Tokoh Masyarakat untuk mengajak masyarakat agar dapat ikut serta dalam pembangunan infrastruktur ?
2. Apakah Pemerintahan kelurahan telah melakukan program pembangunan infraktstruktur dengan semestinya ?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil oleh Tokoh masyarakat ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam suatu pelaksanaan akan mengarahkan peneliti sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan. Tujuan juga suatu tindakan awal pembuatan rencana agar ketika dilaksanakannya suatu pekerjaan dapat mengetahui masalah atau problem

yang akan kita kerjakan tetapi sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa tujuan tidak hanya 1 (satu) tetapi tujuan ada beberapa sehingga apabila tujuan awal tidak terlaksana dengan baik maka ada beberapa alternatif lain untuk mencapai keinginan. Maka, penulis melakukan beberapa tujuan untuk mendapatkan hasil atau data yang sesuai dengan permasalahan sehingga sesuatu yang menjadi kendala penulis untuk mendapatkan suatu tujuan agar menjadi efisien dan terselesaikan dengan baik. Adapun tujuan penulis untuk :

1. Memperoleh informasi bahwa Tokoh Masyarakat dapat berperan dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui apa saja fungsi dari Tokoh Masyarakat tersebut.
3. Mendapatkan bukti yang real bahwa Tokoh Masyarakat telah bersosialisasi terhadap masyarakat.
4. Memperoleh kebenaran dan sekaligus mencari alternatif untuk pemecahan dari perumusan masalah.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang akan diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu sosial dan umum. Maka dari itu manfaat teoritisnya adalah :

- a. Pembaca dapat mengetahui fungsi dari Tokoh Masyarakat itu sendiri.
- b. Aparatur pemerintahan di kelurahan dapat lebih bersosialisasi terhadap masyarakatnya.
- c. Masyarakat dapat lebih tegas serta dapat ikut berpartisipasi dalam memajukan wilayah kelurahan.
- d. Masyarakat dapat mengetahui bukan hanya aparaturnya yang berperan aktif dalam membangun wilayah kelurahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta temuan dilapangan dalam meningkatkan sumber daya manusia, pemikiran kritis serta analisis penelitian sehingga memperoleh pengetahuan tambahan dari penelitian tersebut.

Maka dari itu manfaat praktisnya adalah :

- a. Penulis dapat mengetahui bahwa Tokoh Masyarakat dapat bersosialisasi terhadap pembangunan kelurahan dan bukan hanya berperan di acara keadatan atau kebudayaan.
- b. Aparatur kelurahan dapat lebih berperan aktif dalam menanggapi masalah di kelurahan.
- c. Agar terciptanya kemakmuran dan keharmonisan dalam masyarakat kelurahan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilaksanakan untuk menguji suatu kebenaran yang menuju dalam tarap ilmiah. Maka dari itu, penulis perlu menggunakan kerangka pemikiran.

Menurut W.J.S Purwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia secara etimologi kerangka pemikiran diartikan sama dengan kerangka-kerangka dalam bahasa Inggris kerangka ini sama dengan Concept yang artinya lebih kurang sama dengan pengertian kerangka. Maka dengan menggunakan kerangka pemikiran penulis dapat menemukan serta penulis dapat mengarah kepada apa yang dicari serta diperlukan disaat penelitian berlangsung dilapangan.

Menurut Prof.Sondang P.Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan yang dilaksanakan secara merata dan direncanakan oleh suatu negara atau bangsa yang pemerintahannya bertujuan untuk memodernisasi dalam rangka pembangunan.

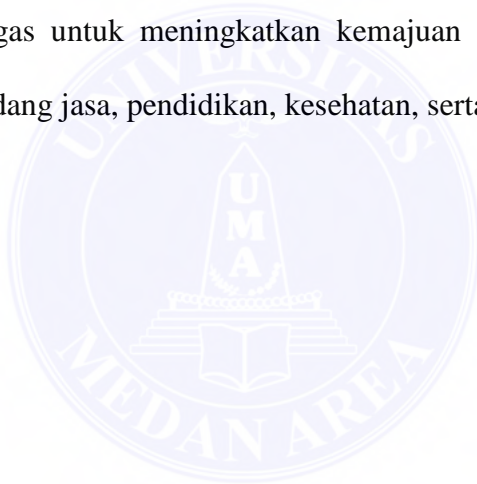
Pembangunan nasional yang bertujuan mencapai tujuan nasional yang terdapat di Undang-undang Dasar alinea ke-IV yaitu kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari uraian diatas maka berkaitan dengan pembanguan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap tingkatan maupun itu tingkatan terendah dengan cara merata dan adil yaitu pembangunan di desa dan kelurahan. Terutama pembangunan di bidang infrakstruktur kelurahan sebab dalam pembangunan tersebut akan meningkatkan sumberdaya manusia, kesejahteraan, dan kenyamanan di masyarakatnya. Maka dari itu, diperlukannya tenaga dan pemikiran dari masyarakat untuk menjalankan suatu perencanaan dan suatu perubahan dalam pembangunan daerah. Masyarakat tidaklah dapat begitu saja terjun langsung

untuk melakukan suatu pembangunan dikarenakan adanya suatu aturan-aturan yang mengikatnya.

Dalam kelompok masyarakat khususnya di daerah perdesaan atau kelurahan diperlukan seseorang yang berperan sebagai pemimpin dan yang menjadi penggerak dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri, maka dari itu diperlukanya Aparatur kelurahan serta Tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat dapat menjadi suatu wadah dalam mengungkapkan aspirasi masyarakat dan pemikiran masyarakat sebab tokoh masyarakat lebih dekat ke masyarakat serta ke individu-individunya. Tokoh masyarakat memiliki fungsi yang bertugas untuk meningkatkan kemajuan di kelurahan maupun itu pembangunan dibidang jasa, pendidikan, kesehatan, serta infrakstruktur kelurahan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Peran , Peranan, Berperan

a. Peran

Pengertian Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok

orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Struktur Peran Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Peran Formal (Peran yang Tampak Jelas) yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); terapeutik; seksual.
- b) Peran Informal (Peran Tertutup) yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga, peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

b. Peranan

Pengertian Peranan Adalah Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang

diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat”. Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain

Peranan bersinonim dengan ‘pengaruh’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘pengaruh’ berarti “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan masyarakat. Makna peranan secara implisit menunjukkan kekuatan. Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Hari Soegiman, 1990: 2). Sementara itu, Alvin L. Bertrand, seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu"(Soleman B.Taneko,1986: 23).

Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Margono Slamet (1985: 15), yang mendefinisikan peranan sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto (1979:94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan (role) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang (John M. Echlos, 2000: 489). Dari beberapa pengertian 'peranan' di atas, dalam penelitian ini peranan didefinisikan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan, yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

c. Berperan

Berperan adalah salah satu sarana yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi, kepribadian seseorang sangatlah bergantung kepada cara individu berperan dengan orang lain.

Menurut Paul B. Horton berperan adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.

Dan dijelaskan juga oleh Giddens berperan atau dapat disebut juga Sosialisasi sebagai sebuah proses yang terjadi ketika seorang bayi yang lemah berkembang secara aktif melalui tahap demi tahap sampai akhirnya menjadi pribadi yang sadar akan dirinya sendiri pribadi yang berpengetahuan dan terampil akan cara hidupnya dalam kebudayaan tempat ia tinggal.

Berdasarkan pengertian berperan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan Berperan ditempuh seorang individu secara bertahap dan berkesinambungan, sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya yang didalam berperan terdapat saling pengaruh antara individu beserta potensi kemanusiaannya dengan masyarakat beserta kebudayaannya.

Berperan erat sekali kaitannya dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu suatu proses belajar seorang individu untuk belajar mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap sistem adat, nilai, sikap, keterampilan-keterampilan, dan norma, serta semua peraturan dan pendirian yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakatnya.

2.1.2. Pemerintahan Kota

Pemerintahan ditingkatan kota merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. Dalam suatu lingkup wilayah kota ada pembagian wilayah-wilayah dan dalam wilayah tersebut dikelola oleh suatu badan pemerintahan daerah yang didalamnya terdapat aparatur-aparatur yang berperan penting dalam meningkatkan stabilitas dan memodernisasi wilayah tersebut.

Adapun aparatur-aparatur pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang tersebut ialah :

- a. Bupati/Walikota
- b. Kesekretariat Daerah
- c. Dinas Daerah
- d. Lembaga Teknis Daerah
- e. Camat
- f. Lurah

Dalam tingkatan kepemimpinan diatas maka kita mengetahui bahwa peran dari aparatur-aparatur memiliki fungsi dan kewewenangan untuk meningkatkan perekonomian, pembangunan, serta status sosial di wilayah kota.

Didalam wilayah kota terdapat pembagian wilayah-wilayah kecil seperti Kecamatan dan Kelurahan maka Pemerintah daerah membentuk badan

kepemimpinan di kecamatan dan kelurahan sebagai upaya meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan di wilayah tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Daerah memberikan kepercayaan dan wewenang untuk memimpin di wilayah Kecamatan yaitu Kepala Camat dan di wilayah Kelurahan yaitu Kepala Lurah. Dengan diciptakannya badan kepemimpinan di wilayah-wilayah kecil seperti kecamatan dan kelurahan dapat mengarahkan masyarakat agar dapat ikut serta dalam meningkatkan daerah hingga kearah yang lebih baik. Dengan ikut sertanya masyarakat dapat mempermudah dan memperlancar sistem pembangunan di daerah, dengan meningkatnya kemajuan di wilayah kecamatan dan kelurahan akan meningkatnya pula kemajuan di Kota.

Pemimpin di kecamatan dan kelurahan sebaiknya dapat bersosialisasi dengan baik terhadap masyarakatnya sebab yang berperan lebih dalam pembangunan di wilayah daerah adalah masyarakat itu sendiri, dengan ketidakpedulian masyarakat daerah akan mengakibatkan dan mempersulit kinerja aparatur-aparatur pemerintah dalam pembangunan kemajuan daerah maka peran dari pemimpin di daerah kecamatan dan kelurahan di perlukan agar dapat merangkul dan bersahabat dengan masyarakatnya.

Adapun peranan ini yang dimaksud, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan agar dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984:237).

2.1.3. Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia kelurahan merupakan wilayah pemerintahan kecil setingkat dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan kelurahan adalah:

- a. Wilayah tersebut memiliki kantor pemerintahan.
- b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar.
- c. Sarana komunikasi yang memadai.
- d. Dan fasilitas umum yang memadai.

Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas akan dapat dihapuskan atau bergabung dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pemekaran kelurahan dapat dilakukan mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintah di kelurahan tersebut.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah kelurahan dengan anggota-anggotanya merupakan pemegang kendali serta memiliki fungsi wewenang untuk memimpin suatu wilayah kelurahan yang bertugas dalam meningkatkan pembangunan, pendidikan, serta kesehatan dimasyarakat kelurahan tersebut, maka dalam maju mundurnya pembangunan di kelurahan tergantung dari kinerja pemerintah kelurahan dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta dalam meningkatkan kemajuan stabilitas dan status sosial di kelurahan, Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan di desa yang merupakan wilayah setingkat dengan kelurahan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ada beberapa tugas dari Lurah yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintah di tingkat kelurahan.
- b. Memberdayakan masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan pada masyarakat.
- d. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan Menegakkan peraturan daerah.

Dalam uraian diatas bahwa Lurah yang bertanggung jawab dan peduli akan masalah di daerahnya maka akan melaksanakan semua kewajibannya sesuai dalam peraturan daerah tersebut.

2.1.3. Pengertian Tokoh Masyarakat

Pemerintah kelurahan atau desa yang menjadi pemimpin di wilayah daerah adapun pemimpin yang berperan di kelurahan atau desa yaitu Tokoh masyarakat. Mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya mereka disebut Tokoh Masyarakat.

Peran tokoh masyarakat adalah sebuah pusat inti dalam sebuah komunitas masyarakat seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang dapat menjadi sebuah panutan oleh masyarakat atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat karena kepemilikan kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

a. Kiprahnya dimasyarakat.

Tokoh yang dimaksud ialah Seseorang yang rajin beribadah atau memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas, bersosialisasi dengan baik pada lingkungan masyarakat, telah melakukan suatu pergerakan atau tindakan langsung yang telah merubah lingkungan atau

daerahnya berkembang kearah yang lebih baik dan moderen dalam bidang positif.

Maka atas perbuatan dan tindakannya masyarakat meletakkannya dalam posisi penting di tengah-tengah masyarakat dalam lingkungan serta daerah contohnya seperti ketua ulama agama, tokoh adat, tokoh lingkungan atau suatu kawasan, tokoh keturunan darah biru, tokoh teladan atau inspirasi, tokoh panutan dalam sebuah pekerja, tokoh pergerakan, bahkan membuatnya dipercayakan untuk mewakili masyarakat dalam sebuah kegiatan dan hal-hal penting (sebuah acara, rapat daerah, seminar, dll) yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan dan daerah, maupun untuk posisi atau jabatan penting pribadinya yang telah diberikan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat yang berada di lingkungannya membuat suatu gelar, penghargaan dan sebutan dengan Tokoh Masyarakat.

b. Memiliki kedudukan formal dipemerintahan.

Seseorang dilingkungan masyarakat yang ingin diposisikan dirinya agar bisa menduduki suatu kedudukan dalam bangku aparatur pemerintahan dalam lingkup lingkungan daerah yang kecil maupun itu dalam lingkup lingkungan daerah yang besar dengan tujuan meningkatkan pembangunan, perekonomian, status sosial, serta bertujuan untuk memajukan daerahnya ke arah yang lebih baik dan makmur sejahtera. Oleh sebab itu, seseorang tersebut harus mencalonkan dirinya atau akan dicalonkan masyarakat dalam suatu

ajang pemilihan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah atau sering disebut dengan pemilu.

Seseorang yang ingin menduduki suatu kedudukan dalam bangku aparatur pemerintahan dapat dinilai dan dilihat dari kesehariannya berperilaku dan berkepribadian baik dilingkungan dan bermasyarakat.

Beberapa kriteria yang umum perlu diperhatikan seperti :

- Rajin dalam melakukan ibadah agama.
- Berpengaruh positif terhadap kehidupan lingkungan masyarakat.
- Dapat bersosialisasi dan bersahabat dengan masyarakat.
- Berpemikiran dengan sudut pandangan yang luas (dalam hal yang positif bukan dalam hal negatif yang menguntungkan pribadi sendiri).
- Memiliki pengetahuan umum serta sosial.
- Berperilaku jujur dan adil dalam suatu hal.

Masih banyak lagi kriteria yang seharusnya di perhatikan. Tetapi, dari beberapa kriteria yang umum diatas bukanlah karena ada alasan tertentu dan bukan dikarenakan untuk suatu keperluan pribadi serta keinginan semata yang akan menjadikannya dapat menduduki bangku aparatur pemerintahan maka orang tersebut merubah dirinya menjadi berperilaku serta berkepribadian baik dalam kesehariannya.

Bukan hal tersebutlah yang diinginkan oleh masyarakat melainkan benar-benar nyata keadaannya di lingkungan bahwa sanya orang tersebut memiliki prilaku dan pribadi yang Baik. Maka dari beberapa kriteria itulah masyarakat akan menilai dan akan memilih siapa yang akan menjadi duduk dibangku pemerintahan seperti RT dan RW, Lurah dan Wakil Lurah, Camat dan Wakil Camat, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan begitu juga dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Seseorang yang telah memiliki kedudukan tersebut akan terjun langsung bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohnya menyebabkan pribadinya dihormati, dibuat jadi inspirasi, diikuti, dan diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu dapat dikatakan sebagai Tokoh Masyarakat, maupun dia masih memiliki jabatan atau kedudukan, sudah pension atau tidak lagi memiliki kedudukan formal.

- c. Mempunyai keahlian khusus dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu atau berbagai bidang.

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah seseorang (masyarakat) yang dimana dia memiliki sesuatu yang berbeda atau yang menonjol dengan orang-orang normal atau masyarakat lainnya yang bersifat positif.

Hal yang berbeda atau yang menonjol dimaksud diatas yaitu:

- Memiliki pola pemikiran dengan pandangan yang luas dalam hal yang positif bukan dalam hal yang negatif.
- Mempunyai pengetahuan yang luas dalam ilmu pengetahuan umum serta sosial.
- Serta memiliki keahlian dan kemampuan khusus tidak seperti orang-orang biasanya.
- Memiliki aura atau kepribadian yang bersifat karismatik.

Beberapa orang atau individu yang memiliki hal-hal diatas dapat membuat masyarakat sekitarnya dan pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan mulai dari tingkatan paling bawah sampai ke atas membuat mereka mengaguminya, meminta pandangan terhadap diri mereka maupun pekerjaannya, meminta pembelajaran ilmu pengetahuan serta nasihat-nasehat kepadanya. Karena kepakarannya maupun keahliannya, maka orang yang bersangkutan diberikan suatu kedudukan dalam masyarakat, penghormatan yang tinggi serta penghargaan akan apa yang dilakukannya. Maka dari itu, orang-orang tersebut dapat dikatakan sebagai Tokoh Masyarakat.

d. Ketua Partai Politik Atau Ketua Organisasi.

Didalam sebuah lingkungan masyarakat maupun daerah terdapat sekumpulan orang-orang yang membentuk sebuah wadah dan setiap wadah tersebut akan dipimpin dan diarahkan oleh seorang ketua. Maka ketua akan menggerakkan sebuah wadah tersebut yang didalamnya terdapat sekumpulan orang-orang atau masyarakat untuk

menciptakan suatu kemajuan dan pembaharuan pada daerahnya serta memperkenalnya ke daerah lainnya.

Ketua yang berperilaku dan bersifat rajin bersilatullahim atau bersosialisai, bersahabat dengan masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi maupun bertukar pemikiran dengan masyarakat, suka menolong diminta atau tidak, memiliki pengetahuan atau wawasan serta rajin beribadah. Maka, ketua partai politik dan organisasi seperti ini dapat disebut sebagai Tokoh Masyarakat.

e. Usahawan atau pengusaha dermawan.

Dalam lingkungan masyarakat ada beberapa orang-orang yang memiliki berpenghasilan menengah keatas maupun itu usahawan atau pengusaha. Usahawan atau pengusaha yang dermawan, rendah hati, suka berzakat, berinfak dan bersedekah, peduli akan kesusahan masyarakat, serta suka bersilatullahim dan selalu ikut serta dalam kegiatan bersosialisasi dilingkungannya. Maka pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai Tokoh Masyarakat.

Selain tokoh-tokoh masyarakat yang kita jabarkan diatas, kita dapat menemukan beberapa tokoh masyarakat lainnya yang tidak kalah penting perannya saat mengambil alih sosial dan dalam bidang pembangunan dilingkungan bermasyarakat. Orang-orang tersebut ialah :

- Para orang tua yang sudah sepuh atau sudah dituakan tak jarang memberikan banyak nasihat yang positif pada generasi yang masih muda untuk tetap bersemangat dan ikut ambil alih dalam mengisi kemajuan dan mensejahterakan kemakmuran di daerahnya.

- Guru juga termasuk tokoh masyarakat yang ikut memainkan peranan penting yang kenyataannya guru berusaha setiap hari dengan gigihnya bertarung dengan memberi pendidikan ilmu pengetahuan untuk melawan kebodohan pada masa depan generasi daun muda yang dimana guru berhadapan dengan berbagai karakteristik anak didiknya bagaimana pun guru berusaha agar hasilnya dapat menciptakan suatu masyarakat yang pada awalnya belum memiliki jati diri hingga kelak menjadi manusia yang bisa memimpin negeri ini dengan moral dan berakhlak.

Secara singkat kita simpulkan, peran tokoh masyarakat adalah memberikan pemikiran dan perilaku yang baik bagi masyarakat, pemikiran dan perilaku tersebut, sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat, dan sejalan dengan yang sesungguhnya dicita-citakan oleh bangsa yang menginginkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kenyamanan dalam sosial bermasyarakat. Maka dari itu tokoh masyarakat ikut serta dalam suatu permasalahan atau pun suatu pembangunan di daerah maupun itu pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta di bidang infrastruktur daerah. Dengan diberikannya suatu kepercayaan atau wewenang dari masyarakat maupun pemerintahan sosok dari tokoh masyarakat memberikan suatu aspirasi yang berasal dari hasil pemikiran masyarakat yang belum tersampaikan maupun belum didengarkan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah masyarakat merasakan dampak positif yang seharusnya mereka dapatkan dari pemerintahan.

Dengan demikian, peran tokoh masyarakat dibutuhkan oleh pemerintah agar dapat bersahabat dan bersosialisasi di daerah maupun itu dibidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah.

2.1.4. Pengertian pembangunan

Pengetian dasar dari pembangunan umumnya adalah suatu usaha perubahan untuk menuju yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu, yakni perubahan-perubahan yang direncanakan dengan daya guna potensi alam, manusia, dan sosial budaya. Potensi alam haruslah digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan demikian juga potensi manusia berupa penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan, pendidikan, dan keterampilannya sehingga mereka mampu menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi alam tersebut semaksimal mungkin. Dalam pelaksanaan pembangunan sering kali terjadi kendala berupa masalah dari lingkungan tersebut yang bersifat fisik, misalnya sering pihak yang terlibat dalam proses sering mengabaikan keadaan lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoperasiannya.

Banyak para sarjana memberikan definisi tentang pembangunan antara definisi yang satu dengan yang lainnya ada beberapa perbedaan dan ada beberapa persamaannya, baik yang menyangkut satu sektor maupun multisektor. Adapun yang membuat suatu definisi dari pembangunan itu berbeda ialah suatu sistem pemerintahan dan kondisi suatu daerah dikarenakan perbedaan tersebut maka pembangunan yang telah menyeleweng akan mengakibatkan kerugian terhadap kelurahan maupun negara.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang pembangunan yaitu :

- a. Menurut Prof.Sondang P.Siagian mendefinisikan bahwa pembangunan adalah rangkaian suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang mempunyai suatu perencanaan dimana bangsa dan pemerintahan akan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.
- b. Dan menurut Drs.Taliziduhu Ndraha mendefinisikan bahwa pembangunan berarti suatu pendorong untuk menimbulkan kebersamaan dan pemerataan nilai dari kesejahteraan, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun nilai-nilai dari rasa saling memiliki.

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan atau berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar 2005, Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah). Terdapat beberapa pembangunan yang sangat berpengaruh di daerah yaitu pembangunan dalam bidang infrastuktur, sedangkan pengertian dari infrastuktur ialah prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll.

Dalam suatu pembangunan wilayah, Infrastuktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan untuk melayani masyarakat dengan membangun sebuah infrastuktur yang saling terintegrasi satu sama yang lainnya serta bila infrastuktur tersebut sangat memadai ini merupakan sebuah kemajuan dalam melaksanakan peningkatan stabilitas sarana dan prasarana fisik serta memodernkan wilayah tersebut. Dengan dilengkapinya berbagai fasilitas fisik merupakan hal inti yang berguna untuk

mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial masyarakat dan pemerintahan mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan, sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan semua itu memerlukan adanya dukungan infrastuktur yang baik serta teratur.

Sering kita melihat akses untuk ke wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya banyak ditemukan jalan-jalan yang rusak berat terutama di daerah perdesaan atau kelurahan, Ini semua adalah suatu gambaran atau potret yang membuat kecacatan terhadap Negara Nasional oleh sebab itu hal ini tidak bisa dibiarkan saja dan terus-menerus berkembang selayaknya hama yang akan menyebar memberikan pengaruh pada yang lainnya sehingga lambat laun akan semakin melebar luas.

Akan tetapi, telah diusahakannya upaya-upaya dan perbaikan secara perlahan-lahan tetap saja terjadi suatu kendalan berupa masalah dari pihak-pihak yang menyembunyikan brangkas besarnya untuk selalu berusaha mencari celah kosong walau sekecil apapun agar dapat mengisi perlahan-lahan brangkas yang mereka miliki. Maka pihak-pihak tersebut berusaha dengan berupaya terlibat di dalam rangka kegiatan-kegiatan pemerintahan dan maupun itu dari kegiatan diluar pemerintah, seperti sering kita perhatikan pihak-pihak tersebut masuk dalam kegiatan pembangunan dan mereka lebih mengutamakan hasil dari dana pembangunan itu sendiri untuk kepentingan memperkaya kepribadiannya sendiri, sementara dampaknya terhadap hasil pembangunan yang mereka jalan hanya bersifat sementara atau tidak tahan lama hal hasil lagi-lagi cacat fisik yang terjadi pada Negara dan yang menerima serta merasakannya masyarakat.

Pemerintah yang berawal dari Kelurahan hingga Negara Nasional seharusnya merasa malu akan masih adanya daerah-daerah pedalaman yang tertinggal jauh dan bahkan masih ada yang bersifat primitif, tidak hanya daerah pedalaman bahkan daerah-daerah dekat dari pinggiran pusat kota masih ditemukan pembangunan yang belum usai sehingga terabaikan dan infrastruktur yang tingkat ketahuannya hanya sementara.

Beberapa hal kecil yang seharusnya dilakukan Pemerintah ialah :

- a. Memeriksa secara langsung kesetiap daerah yang seharusnya membutuhkan bantuan pembangunan.
- b. Memberikan bantuan yang semestinya diterima oleh daerah-daerah yang benar-benar memerlukan bantuan.
- c. Terjun langsung mengawasi lokasi-lokasi yang sedang berjalannya suatu pembangunan agar tidak terjadi kecurangan pada saat dilokasi.
- d. Memeriksa data-data pembukuan pengalokasian jumlah dana maupun itu masuk dan yang keluar, material maupun non material, fisik maupun non fisik apakah telah sesuai pada saat pemberian bantuan dengan apa yang diperlukan dan telah digunakan ke lokasi agar tidak terjadi manipulasi data-data pembukuan.
- e. Pemerintah sebaiknya lebih tegas dalam mengambil sikap untuk menghukum siapa-siapa yang telah menyelewengkan bantuan maupun itu berupa bantuan dana, dan bantuan berupa material atau non material, fisik atau non fisik.

Daerah yang melakukan proses kegiatan untuk meningkatkan dan memajukan pembangunan daerah dalam berbagai bidang maupun itu sosial,

kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lainnya. Setiap pembangunan yang ingin dituju pasti akan menuju pembangunan yang efisien dan memadai dalam berbagai aspek, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan pula pendana yang serius dan membutuhkan bantuan yang banyak mulai dari fisik maupun non fisik. Daerah yang membutuhkan bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sebab hal tersebut telah menjadi sebuah kewajiban untuk membantu untuk mencukupi serta memadai fasilitas yang dibutuhkan daerah maupun itu dari aspek bantuan dana pembangun, alat berat pembantu pembangunan, dan material fisik maupun non fisik. Adapun dana yang dialokasikan untuk bantuan pembangunan tersebut berasal dari :

1. Dana dari APBN atau APBD.
2. Dana masyarakat yaitu dari pajak.
3. Sumber dana dari pemberian Donatur pengusaha.

Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastuktur khususnya jalan, jembatan, dll. Sedangkan untuk pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu:

“ penganggaran dalam rangka pelaksanaan dana yang diperlukan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.

Namun jika pemerintah daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka pemerintah pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat(2) dan (3) PP No.34 Tahun 2006 yang menyebutkan:

Ayat 2 “ Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara

keseluruhan. Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ayat 3 “ ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyarafat pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana di maksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. “

Untuk membantu pemerintahan daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan maka pemerintah pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastuktur.

Dari uraian diatas, bahwa dapat dikesimpulan bahwa sebuah pembangunan merupakan suatu proses perubahan dari suatu keadaan yang kurang baik ke arah yang lebih baik maka dalam perubahan itu dilakukan dengan bertujuan untuk menuju modernitas yakni cara hidup lebih baik dari pada yang sebelumnya mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara terarah, teratur, sadar, dan berencana untuk mencapai suatu kemakmuran, kesejahteraan dan dapat disimpulkan pula bahwa pengertian dari Pembangunan infrastuktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada rakyat yang berunsur di bidang pembangunan nasional atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembagunan.

2.1.5. Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan

Kelurahan merupakan bentuk local state government atau pemerintah negara pada level masyarakat lokal, konstruksi ini mengingatkan kita pada kewenangan atributif yang dimiliki Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat. Kewenangan yang melekat pada pejabat dan bukan organisasi pemerintahan kelurahan pada Undang-Undang No.2 Tahun 1979 memiliki kedudukan yang kokoh, meski otonomi berhenti di tingkat Kabupaten/Kota sukar untuk menampilkan kesan bahwa kelurahan berposisi sebagai organisasi kekuasaan tingkat 5 dibawah negara, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Ada pula kesan bahwa kelurahan merupakan kelas bergengsi berikut yang dapat digapai oleh desa apabila desa telah mencapai kemajuan.

Perubahan paradigma kekuasaan sangat reformasi tercermin dalam politik pemerintah daerah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberi kekuasaan pengaturan kelurahan kepada kabupaten/kota, penjelasan umum undang-undang ini menyebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja yang dimana pemerintahan bekerja.

Masalah yang dapat timbul di kelurahan adalah masalah masyarakat kelurahan tersebut maka dari itu masyarakat itu sendiri yang menyelesaikan dan mendefinisikan masalah-masalah yang berada di kelurahan tersebut.

Pembangunan yang memadai dan pembangunan yang baik akan menciptakan kelurahan yang tentram, damai, serta kemakmuran dalam masyarakatnya maka dari itu pembangun yang efisien berdampak penting dalam kemajuan di Kelurahan. Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur kelurahan benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan pembangunan yang efektif

dapat mengubah taraf kesejahteraan masyarakat kelurahan tersebut. Dengan efektifnya suatu pembangunan akan meningkatnya pula kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan yang mampu membawa masyarakat kelurahan ke fase modernisasi sehingga kelurahan tersebut tidak menjadi kelurahan atau wilayah yang tertinggal.

Maka dari uraian diatas, dapat kita artikan bahwa pembangunan infrastuktur kelurahan sangatlah diperlukan dalam kelurahan sebab majunya suatu kelurahan akan meningkatkan roda stabilitas atau modernisasi kearah yang lebih maju, tentram, serta menciptakan kemakmuran di masyarakat kelurahan tersebut.

Perkembangan pembangunan infrastuktur yang didasari dari kebutuhan, situasi, dan kemajuan zaman dengan melakukan pembangunan kelurahan berarti mempersiapkan seluruh potensi kebutuhan masyarakat kelurahan, oleh karena itu potensi-potensi yang telah di pergunakan dalam kelurahan harus di kembangkan sebab apabila potensi-potensi tersebut terhambat dikarenakan infrastuktur yang tidak memadai akan menyebabkan ketertinggalannya suatu kelurahan atau wilayah tersebut.

Pembangunan infrastuktur kelurahan merupakan pendekatan atau kinerja dari beberapa konsep pemerintah yang disalurkan kepada kelurahan, dan konsep tersebut ialah:

- a. Adanya aktivitas Pembangunan infrastutur kelurahan yang cukup positif dalam membantu aksesibilitas masyarakat di bidang sosial dan layak dikembangkan lebih lanjut dalam mndorong pertumbuhan wilayah kelurahan.

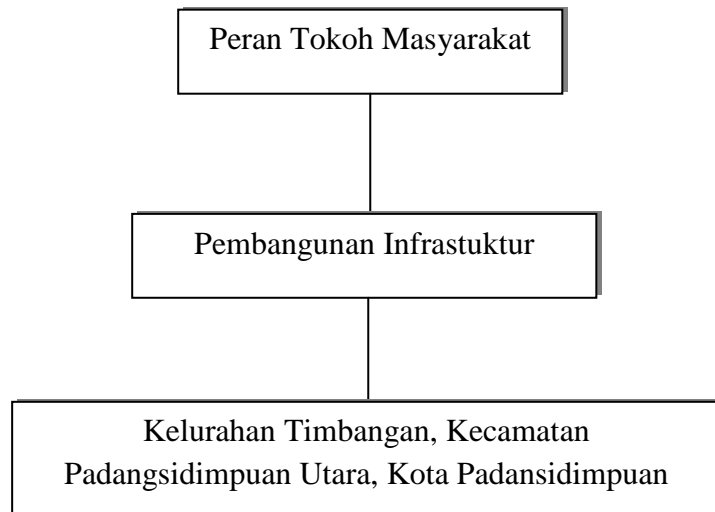
- b. Kehadiran infrastuktur kelurahan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat kelurahan.
- c. Infrastuktur kelurahan dibangun dengan memperhatikan nilai-nilai masyarakat yang hidup di kelurahan dan oleh karena itu pendekatan pengembangan masyarakat merupakan salah satu ciri yang melekat dalam kelurahan tersebut.
- d. Karakteristik dari pembangunan infrastuktur kelurahan yaitu melibatkan kelompok fasilitator pengembang kelurahan yang mempunyai jabatan atau peran penting dalam kelurahan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan tentang penelitian penulis yang akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai konsep-konsep yang akan di teliti. Peneliti akan menggunakan kerangka pemikiran yang telah disusun untuk menentukan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka pemikiran diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka pemikiran.

Maka dari itu, Penelitian ini tentang bagaimana sikap dan peran dari Tokoh Masyarakat terhadap pembangunan infrastuktur di kelurahan Timbangan.

Bagan penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komperatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu masalah.

Menurut Sugiyono, (2003:14) terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

- a. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan memperoleh data berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkat
- b. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambaran.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menggunakan metode kualitatif, dengan metode ini penulis dapat memahami dan mengungkapkan tentang masalah yang penulis teliti, dan juga metode kualitatif ini penulis di saat melakukan interview dengan objek yang penulis teliti.

3.1.2. Lokasi, dan Waktu Penelitian

Lokasi sangatlah dibutuhkan dalam peneletian sebab dengan tidak adanya lokasi yang ditentukan maka peneliti tidak akan mengetahui hasil fakta yang sebenarnya di lokasi adapun lokasi menurut para ahli ialah:

- a. Hover dan Giarratan (2007) berpendapat bahwa lokasi merupakan tata ruang kegiatan.

b. Wlater Christaller mengatakan lokasi adalah suatu tempat dimana individu antara individu melakukan hubungan antara sosial-ekonomi dan fisik yang saling mempengaruhi.

Maka penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sebab masih kuatnya tingkat kepedulian Tokoh Masyarakat di daerah tersebut terhadap lingkungannya dan agar memperkenalkan bahwasanya Tokoh masyarakat bukan hanya sekedar tokoh di acara budaya atau keadatan. Tapi, kokoh masyarakat dapat berperan luas dilingkungannya.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari bulan November sampai dengan selesainya penelitian .

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan dimana lokasi pengambilan data. Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang diperlukan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan suatu penelitian pengumpulan data langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian serta langsung kepada objek atau subjek yang akan dilakukan penelitian.

teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung bertatap muka dengan orang-orang sebagai objek penelitian atau sebagai sumber data.
- b. Observation yaitu pengumpulan data dengan cara peneliti langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati sebagai sumber data.
- c. Questionary yaitu dengan memberikan angket pertanyaan kepada responden berupa pertanyaan tertentu dengan menawarkan beberapa alternative jawaban yang sudah ditentukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan.

3.3. Informan

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap jenuh (data saturation). Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh

sebelumnya (point of theoretical saturation). Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Lurah.
2. Masyarakat sekitar.
3. Ketua dari PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
4. Ketua dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).

Maka dari itu, ketua RW sebagai Tokoh Masyarakat yang akan menjadi sebagai informan kunci (*key informan*) karena pada Kelurahan Timbangan sosok ketua RW merupakan sosok yang lebih dekat dengan masyarakat, dan kebetulan ketua RW di Kelurahan Timbangan merupakan Imam Masjid dan ketua dari perkumpulan Pengajian atau dapat disebut dengan Tokoh Agama di Kelurahan Timbangan yaitu ketua RW 2 Lingkungan 1 yang bernama H. Indra Simbolon dan ketua RW 1 Lingkungan 4 yang bernama H. Turman Harahap.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut 1980:268 (Lexy J. Moleong 2007:248) adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Platto membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Bodgan dan Taylor 1975:79 (Lexy J. Moleong 2007:280) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh

data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian dapat disintesis menjadi Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Pada dasarnya definisi pertama lebih menitik beratkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian definisi tersebut dapat disintesis menjadi Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

Analisa data kualitatif (Lexy J. Moleong 2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan menurut definisi Saiddel, 1998 (Lexy J. Moleong 2007:248) prosesnya belajar sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu di beri kode agar sumber data yang tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar katagori data itu mempunyai makna, mencari dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut McDrury, 1999 (Lexy J. Moleong 2007:248) tahap analisa data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.

Dari definisi-defini tersebut dapat disimpulkan, analisa data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilaksanakan dengan melakukan langkah-langkah analisis data sebagai pemaparan dari data-data yang diperoleh dari sampel dan akan di kelompokkan sesuai jenisnya, selanjutnya akan dianalisis hubungan antara data yang ada. Memberikan gambaran awal tentang data-data yang masih diperlukan maupun yang telah dicakup maka dapatlah kita menarik garis bawah analisis data bermaksud mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Bahwa analisis data itu dilakukan dalam suatu proses, Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah meninggalkan lapangan. Pekerjaan

menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan penerahan tenaga, pikiran peneliti selain menganalisis data. Peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengkonfirmasi teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru yang barangkali ditemukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. *Dalam Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah*. PT. Media Tama, Jakarta 2005
- Benny N.2010. *Makna Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945*, diakses di <http://nurnurfaizinbenny.blogspot.com/2010/11/makna-alinea-alinea-pembukaan-uud-1945.html> pada 26 desember 2014.
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Bogdan dan Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Usaha Nasional, Surabaya 1992.
- Djojodipuro, Marsudi. *Teori Lokasi*. Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1992.
- Friedman, Marilyn M. *Pengertian Peran Defenisi Menurut Para Ahli, Konsep*,
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosadakarya, Bandung 2007.
- [Prof. DR. Iwan Nugroho](#) dan Prof. DR. Rokhmin Dahuri. *Peningkatan nasionalisme dalam Pembangunan Wilayah Guna Pemberdayaan Kewirausahaan Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, LP3ES, Jakarta (ISBN 979-3330-90-2).
- [Prof. DR. Taliziduhu Ndraha](#). *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta , Jakarta 1999-216 halaman.
- Rasyid, M. 1992. *Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Universitas Tadulako Palu
- Sawe, Jamaluddin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Soekamto. *Pengertian Tentang Peranan*. www.google.pengertianperanan.com
- Struktur*. (192) Debora Ina R.L. Jakarta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. pusat bahasa, Bandung 2003.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Transito, Bandung 1982.

T.B Bottomore. *Elite dan Masyarakat*. Terj. Abdul Haris dan Sayid Umar. Akbar Tanjung Institute, Jakarta 2001.

[W. J. S. Poerwadarminta](#). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1961-1122 halaman.



L

A

M

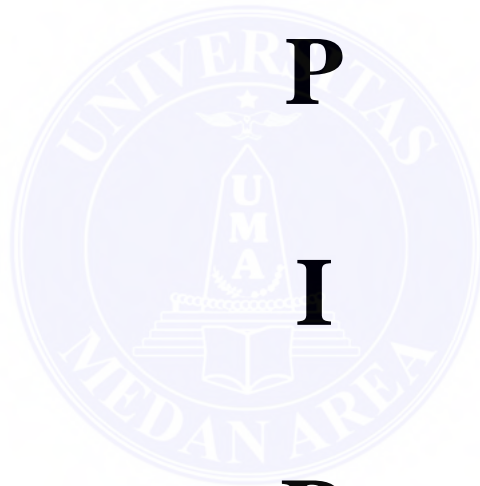
P

I

R

A

N



Gambaran Informan

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kelurahan Timbanagn terhadap warga masyarakat yang berada di wilayah informan, hal tersebut memungkinkan pemberian informasi tentang peran dari tokoh masyarakat terhadap masyarakat dan peran terhadap pembangunan infrastruktur yang diharapkan. Informan diharapkan dapat memberi respon secara selayaknya terjadi dilapangan. Sosok Tokoh Masyarakat merupakan salah satu kepemimpinan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan pada masyarakat. Sebagai yang mempunyai kekuasaan dan wewenang telah mendorong melakukan sesuatu, termasuk terjun langsung dalam pembangunan yang efektif serta objective. Informan tersebut ialah :

Hj.Masreni Siregar

Ibu Hj.Masreni Siregar selaku menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Kelurahan Timbangan. Kepala kelurahan berpendapat bahwa. “ *Dalam pelaksanaan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bukanlah hanya tugas dari pemerintah kelurahan semata melainkan itu semua harus ada rasa kesadaran diri dari setiap warga. Apabila kami dari aparaturn pemerintah langsung mengesahkan program-program yang diutarakan oleh warga-warga akan tetapi dari warga tersebut tidak dapat menjaga, melindungi, serta menjaga kebersihannya akan tidak ada manfaatnya dan pada saat dilakukannya pelaksanaan kegiatan masih ada beberapa warga yang tidak peduli atau tidak mau ikut serta dalam melakukan kegiatan pelaksanaannya*”.

H.Turman Harahap

Seorang yang berlatar pendidikan dari pesantren ini, dan memiliki status sosial yang tinggi telah menjadikan sebagai sosok yang dijadikan pedoman dalam lingkungan keagamaan serta ketua dari RW 1 Lingkungan 4. Dengan keterlibatan kepala kelurahan sebagai pusat di dalam pemerintahan kelurahan. Maka Bpk.H.Turman Harahap selaku tokoh masyarakat memiliki persepsi bahwa apabila tidak adanya dorongan langsung dari tokoh elit tradisional, maka masyarakat kurang dapat ikut serta dan minimnya keyakinan masyarakat terhadap perencanaan pemerintah kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat H.Turman Harahap selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa: ” *Bagi saya partisipasi masyarakat merupakan hak seseorang, sejauh ini kepala kelurahan tidak mempengaruhi warga secara langsung dalam tingkat kepedulian, namun secara tidak langsung para staf-staf dan perangkat kelurahan telah terjun langsung ke masyarakat untuk mempengaruhi keputusan masyarakat agar dapat berpartisipasi agar ikut serta dalam membangun infrastruktur dikelurahan timbangan ini dan kami jajaran dari perangkat kelurahan bersedia ikut terjun langsung pada saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebab apabila kami tidak ikut serta langsung maka kami tidaklah pantas mengemban tanggung jawab kami sebagai yang dipercayai.*”

H.Indra Simbolon

Sebagai ketua RW 2 Lingkungan 1 yang menjadi sosok yang disegani dan menjadi tokoh agama di lingkungannya. ketika penulis menanyakan kepada Bpk. H.Indra Simbolon tentang bagaimana cara penyampaian rancangan atau program yang dilaksanakan terhadap masyarakat. Sesuai jawaban Bpk.H.Indra Simbolon : “ *saya selaku ketua RW pertama menanyakan langsung kepada warga apa-apa*

yang dibutuhkan dalam lingkungan kita ini dan apa yang menjadi kendala infrastruktur di lingkungan tersebut, kemudian saya meninjau langsung kelokasi-lokasi yang menjadi permasalahan dan kendala terhadap masyarakat. Setelah selesai melakukan peninjauan lokasi saya akan mengangkat hal-hal tersebut dalam rapat di kelurahan, setelah kami telah mendapatkan hasil yang sah dan diterima di kelurahan maka kami selaku perwakilan di rapat kelurahan melakukan rapat bersama dilingkungan agar bertujuan menyampaikan hasil dari rapat yang telah kami hadiri dan apabila ada salah warga yang tidak memahami kami langsung menjabarkan langsung kelokasi dari permasalahan dan memberikan gambaran umum yang detail terhadap warga “.

Hj. Nur Hafni siregar

Beliau sosok yang dikenal sebagai sosok yang santun serta peduli, dan beliau adalah ketua dari pengajian ibu rumah tangga serta sekaligus guru di salah satu sekolah SLTP Negeri. Ketika penulis mengajukan pertanyaan bagaimana peran dari ibu rumah tangga dikelurahan pada saat berlangsungnya kegiatan pembangunan dikelurahan. Ibu Hj.Nur Hafni siregar mengatakan : *“ kami para ibu-ibu rumah tangga tidak kalah ikut sertanya terhadap bapak-bapak yang sedang bekerja kami sebagian ikut serta membantu pada saat pelaksanaan misalnya membantu mengangkat peralatan yang bisa kami angkat. Tapi, kami terutama bertugas dalam penyediaan minuman dan makanan misalnya kami bersama-sama memasak dan memberikannya kepada para pekerja”.*

Alex Sinaga

Beliau yang menjabat selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). pada saat wawancara dilakukan penulis mengajukan pertanyaan terhadap Bpk.

Alex Sinaga bagaimana tingkat kerjasama pemerintah kelurahan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibidang pembangunan infrastruktur dikelurahan Timbangan. Bpk. Alex Sinaga menjawab : “ Pada saat kami melakukan perencanaan dan diskusi di kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, kami turut mengundang aparatur kelurahan walau pun terkadang undangan kami tersebut tidak di hadiri. Pemerintah kelurahan selalu menanggapi rancangan aktivitas kami walau pada saat pendiskusiaian tersebut ada beberapa juga rancangan atau program yang tidak diterima dengan alasan anggaran atau dana yang belum memadai atau waktu pelaksanaan tidak dapat dilakukan dengan semestinya disebabkan belum selesainya pelaksanaan pembangunan dari program sebelumnya maka mengakibatkan dari itu akan terjadi kendala berupa kurangnya dana serta pekerja yang dibutuhkan. Tingkat kerjasama pemerintah kelurahan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat cukup bersahabat hanya saja dana dan waktu pelaksanaannya yang terkadang tidak tepat. Oleh sebab itu rancangan aktivitas kami tidak dapat terlaksanakan”.

Anto

Sebagai masyarakat desa yang berpendidikan rendah dan bekerja sebagai buruh tani, dalam peneliaanya terhadap kinerja kepala desa dapat memandang bahwa sosok kepala desa dapat mengayomi masyarakat dengan baik dan telah melaukuakn berbagai program pembangunan yang belum tercapai pada masa kepala desa sebelumnya. Keterlibatan kepala desa dalam penggerak politik

dipandang tidak masalah karena meskipun kepala desa mengajak untuk memililih salah satu partai atau kandidat politik tertentu, tetapi bersifat tidak memaksa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Tm yang mengatakan bahwa:

” Bagi saya pemerintahan dibawah kepala desa sekarang ini cukup baik karena kepala desa dipandang sebagai sosok yang dapat mengayomi masyarakat, bagi saya dengan keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik tidak masalah dan setuju-setuju saja, karena seruan kepala desa

tersebut bersifat tidak memaksa .6 Sebagai seorang buruh tani dan masyarakat kecil sosok kepala desa dirasa telah memberi perubahan pada masyarakat terutama pada aspek pembangunan. Di bandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya sosok kepala desa sekarang telah mampu membawa masyarakat kearah yang lebih baik.

Hn

Sebagai salah satu warga masyarakat yang mengikuti partisipasi politik, memandang bahwa keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik merupakan suatu hal yang tidak etis, hal tersebut didasarkan bahwa kepala desa merupakan birokrat desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa bukan diangkat dari parpol. Sehingga kepala desa diharap bisa bersikap netral, dengan demikian kepala desa akan melaksanakan tugasnya dengan tidak mementingkan golongan tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hn bahwa:” Kepala desa diharap bersikap netral, karena kepala desa diangkat oleh masyarakat desa secara langsung bukan dari parpol, meskipun demikian keterlibatan kepala desa sebagai penggerak politik dirasa tidak masalah manakala pilihan politik seseorang sama dengan kepala desa.”⁴ Sikap netral pada kepala desa akan menciptakan suasana yang harmonis di dalam masyarakat karena masyarakat akan memandang bahwa kepala akan menerima aspirasi masyarakat tanpa memandang dari golongan politik

manapun. Kenetralan pada kepala desa dirasa oleh individu dalam masyarakat sebagai bentuk yang memberi kepercayaan bagi masyarakat, dimana kepala desa merupakan pilihan masyarakat dan bukan dari parpol. Meskipun demikian tidak memberi suatu masalah manakala apa yang menjadi kepentingan politik kepala desa sesuai dengan masyarakat. Apabila birokrasi memihak pada salah satu kekuatan partai politik, yang sedang memerintah, sementara itu diharapkan birokrasi pemerintah itu memberikan pelayanan kepada rakyat secara adil dan merata sebagaimana tugas dan fungsi negara dan pemerintahan pada umumnya, maka sikap pelayanan tersebut jelas tidak terpuji.



Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Dana APBN

Kota/Kab	Kecamatan	Desa / Kel	Nama Bkm/Lkm	Jml Ksm	Nama Ksm	Kode Kegiatan
Padangsidempuan	Psp.Utara	Timbangan	Timbangan	3	Aek Lokan	L-037 L-021
					Harambir	L-021
					Kelapa	L-021
						L-021

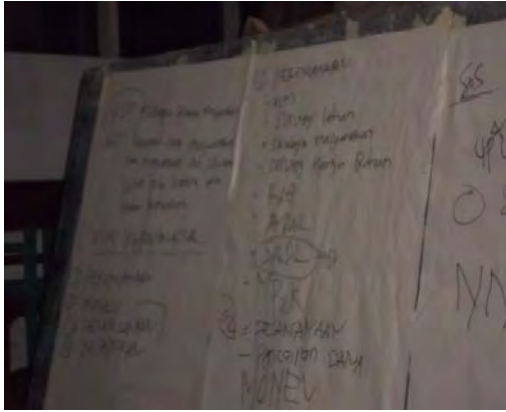
Usulan Istisna'a (Rencana)					
Jenis Kegiatan	Volume	Sat.	Blm Apbd (Ddub)	Swadaya	Total
1.Jembatan	4 X 3	M'	25.535.000	2.225.000	27.760.000
2. Pemb Drainase	40	M'	17.533.000	1.855.000	19.388.000
1. Pemb. Drainase	50	M'	26.875.000	3.555.000	30.430.000
1. Pemb. Drainase	28	M'	11.885.000	2.045.000	13.930.000
2.Pemb.Jalan (Rabat Beton)	85,5	M'	23.672.000	2.155.000	25.827.000

Realisasi Fisik Dan Keuangan									
Jenis Kegiatan	Volume	Sat.	Bop	Dana Blm Yang Cair Ke Panitia/Ksm		Realisasi Fisik			
				NILAI	(%)	NILAI	SWADAYA	SWADAYA	(%)
1.Jembatan	4 X 3	M'	4.500.000	20.770.000	100 %	20.770.000	2.225.000	22.995.000	100 %

2. Pemb Drainase	40	M'		17.533.000	100 %	17.533.000	1.855.000	19.388.000	100 %
1. Pemb. Drainase	50	M'		26.875.000	100 %	26.875.000	3.555.000	30.430.000	100 %
1. Pemb. Drainase	28	M'		11.885.000	100 %	11.885.000	2.045.000	13.930.000	100 %
2.Pemb.Jalan (Rabat Beton)	86	M'		23.672.000	100 %	23.672.000	2.155.000	25.827.000	100 %

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pembangunan







Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan

1. Pelaksanaan Pembangunan Jalan



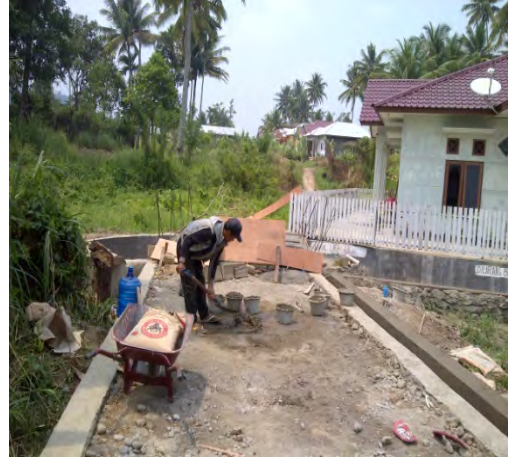






2. Pembangunan Jembatan Penyeberangan





3. Pembangunan Derainase



